BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Definisi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Menurut Azhar Susanto (2013:22):

> "Sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, yang disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan yang dihasilkan oleh suatu proses tertentu yang bertujuan untuk menyediakan informasi untuk membantu mengambil keputusan manajemen operasi perusahaan dari hari ke hari serta menyediakan informasi yang layak untuk pihak di luar perusahaan".

Menurut Sutarman (2012:13):

> "Sistem informasi adalah sistem yang dapat didefinisikan dengan mengumpulkan, memperoses, menyimpan, menganalisis, menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu. Seperti sistem lainnya, sebuah sistem informasi terdiri atas input (data, instruksi) dan output (laporan, kalkulasi)".

Sedangkan menurut Sutabri (2012:46):

> "Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan".

Menurut Rosmery Elsye (2016:2):

> "Pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaran pemerintah daerah yang dapat dinilai dari seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah".

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat dikatakan bahwa sistem informasi ini juga merupakan salah satu fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri

kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan.

2.1.1.1 Indikator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Menurut Rosmery Elsye (2016:2) yang terkait pada sistem informasi pengelolaan keuangan daerah meliputi:

a. "Perencanaan
   Untuk menjamin agar kegiatan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasara maka diperlukan perencanaan pengelolaan keuangan daerah serta keseragaman peraturan yang berlaku guna tercapainya tujuan otonomi daerah dan menghindarkan dari ketimpangan permasalahan antarwilayah.
b. Pelaksanaan
   Masing-masing satuan kerja wajib melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, atas pelaksanaan kegiatan oleh satuan kerja, ada dua sistem yang terkait dengan pelaksanaan anggaran yaitu sistem penerimaan dan sistem pembayaran.
c. Penatausahaan
   Penatausahaan merupakan prosedur pada saat kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan, mencatat, mempertanggungjawabkan, dan melaporkan,
d. Pelaporan
   Laporan keuangan pemerintahan daerah merupakan salah satu wujud bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan operasional pemerintah daerah, hal tersebut menjadi tolak ukur kinerja untuk dapat dipertanggungjawaban pada setiap akhir tahun anggaran.
e. Pertanggungjawaban
   Dalam munculnya otomo daerah dalam bidang keuangan, pemerintah daerah mempunyai kebebasan untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri, Pemerintah daerah bias merencanakan sendiri, melaksanakan sendiri serta mempertanggungjawabkan sendiri,
f. Pengawasan
   Pengelolaan keuangan pemerintah daerah setiap tahun akan mengalami dua (dua) kali pengawasan, yaitu dari pihak internal (APIP) dan pihak eksternal (BPK). Pemeriksaan APIP dilakukan dalam tahun berjalan karena itu disebut *interim audit*, sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal dilakukan setelah tahun berjalan disebut *post audit"*.

2.1.2 Definisi Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Azhar Susanto (2009:18):

> "Sistem adalah kumpulan/*group* dari sub-sistem/bagian/komponen apapun baik phisik ataupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu".

Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

> "Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut".

Menurut Mamesah (2010:18):

> "Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dimulai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan".

Adapun menurut Erlina Rasdianto (2013:6):

> "Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah".

Sedangkan, Deddi Nordiawan (2010:201):

> "Sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran daerah yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer".

2.1.2.1 Indikator Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Deddi Nordiawan (2010:201) yang terkait sistem akuntansi yaitu:

a. "Pencatatan
b. Pengikhtisaran
c. Pelaporan".

2.1.3 Definisi Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Menurut Iman Mulyana (2010:96):

> "Mengemukakan bahwa kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan".

Sedangkan, Mahmudi (2016:143):

> "Laporan keuangan merupakan *output* dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan".

Sementara itu, Erlina dan Rasdianto (2013:8):

> "Laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya merupakan keempat karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki".

2.1.3.1 Indikator Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Menurut Erlina Rasdianto (2013:8) yang terkain kualitas laporan keuangan yaitu :

a. "Relevan
b. Andal
c. Dapat dibandingkan
d. Dapat dipahami".

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Menurut Mardiasmo, (2002:67):

> "Bahwa sistem pertanggungjawaban keuangan suatu instuti dapat berjalan dengan baik bila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik pula, ini berarti pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam anggaran pendapatan belanja daerah memiliki posisi strategis dalam mewujudkan manajemen pemerintah yang akuntabel sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan yang bekualitas harus disusun oleh personel yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi".

Darise, (2009:297) mengatakan:

> "Dengan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintah yang baik (Good Governance, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan untuk mengelola Keuangan Daerah, dan menyalurkan informasi Keuangan Daerah kepada publik)".

Sedangkan, Chabib dan Heru, (2010:67) mengatakan:

> "Laporan pertanggungjawaban menjadi salah satu kewajiban pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 laporan keungan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Maka untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah harus berupaya untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan daerah dengan menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keungan Daerah".

Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 merupakan proses yang mendukung dan menjadi bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah diperlukan pedoman dalam pelaksanaannya, maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang berisi tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebelum mengurai sistem pengelolaan keuangan daerah terlebih dahulu dikemukakan pendapat mengenai pengertian sistem itu sendiri. Adapun pengertian sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari suatu organisasi, sedangkan prosedur adalah suatu urut-urutan pekerjaan, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu organisasi.

Sehingga keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamya segala bentuk kekayaan daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya dalam pasal 4 dan 5 dikatakan pula bahwa, pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam anggaran tertentu.

Pernyataan-pernyataan di atas didukung oleh peneliti P. Ayu Ratna Dewi (2014) hasil penelitiannya mengemukakan bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Selanjutnya, menurut Burhanuddin Baharuddin (2016) hasil penelitiannya mengemukan bahwa Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

2.2.2 Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Menurut, Mardiasmo (2004:35):

> "Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal, sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan, sehingga penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang tidak baik akan menyebabkan kualitas laporan keuangan juga tidak baik".

Menurut, Bastian (2007:4):

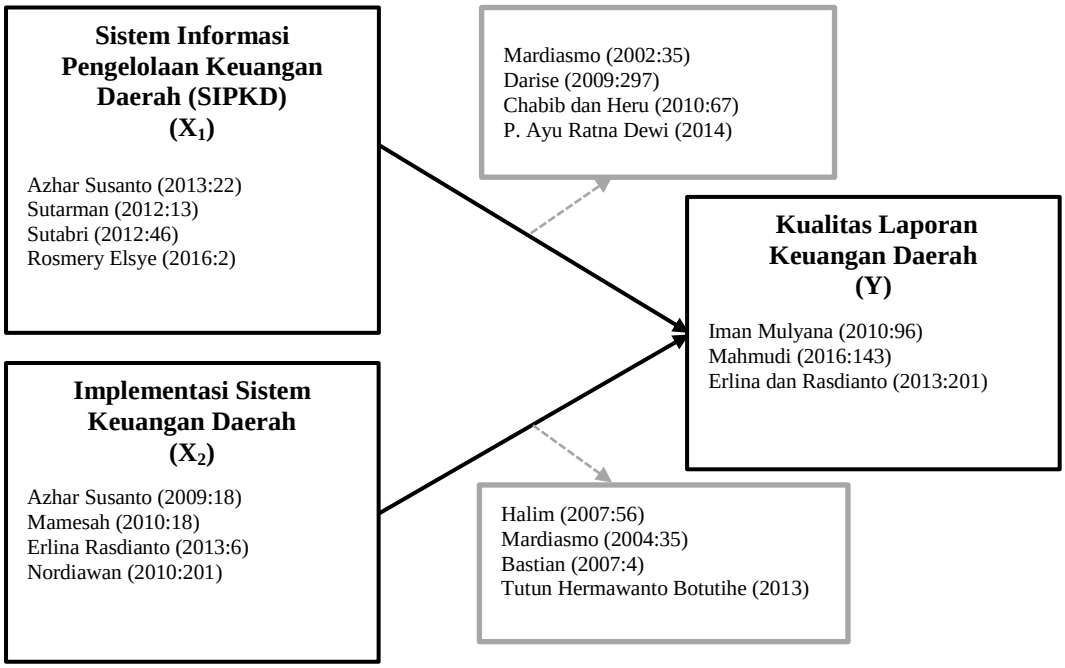
> "Mengemukakan jika belum memahami sistem akuntansi, maka belum memahami penyusunan laporan keuangan, karena akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi atau laporan keuangan".

Halim, (2007:56) mengatakan:

> "Sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan daerah harus dipahami secara memadai oleh pengelola dan penyaji informasi keuangan agar dapat dijadikan salah satu alat dalam mengendalikan roda pemerintahan".

Penelitian yang khusus membahas tentang keterkaitan implementasi Peraturan KPU Nomor 94/Kpts/KPU/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum dengan Kualitas Laporan Keuangan sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan masih terbatas. Penelitian yang mempunyai kaitan dengan implementasi berbagai peraturan perundang-undangan telah banyak dilakukan. Seperti penelitian yang dilakukan Tutun Hermawanto Botutihe (2013) menunjukkan bahwa dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Gorontalo. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas dapat dibangun suatu harapan bahwa implementasi Pedoman pengelolaan keuangan yang diikuti dengan pemahaman yang baik dari semua pegawai yang terlibat akan mampu melahirkan laporan keuangan yang berkualitas sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Berdasarkan pemaparan teori-teori penghubung diatas, maka dapat dikatakan bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Sehingga dapat digambarkan paradigma penelitian yang memperlihatkan hubungan antar *variable* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut, Sugiyono (2013:99):

> "Menjelaskan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik".

Sedangkan, menurut Nanang Martono (2014:67):

> "Hipotesis adalah jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji
>
> atau rangkuman simpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka".

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka peneliti berasumsi mengambil keputusan sementara (hipotesis) sebagai berikut:

H_1 : Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

H_2 : Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.